

BHAGAVADGĪTĀ: KEBEBASAN, MORAL, KEBAHAGIAAN

BASIS



Tianxia :
Filsafat China
tentang
Tata Pemerintahan
Dunia

Seabad
Sartono Kartodirdjo
(1921-2021):
Bacaan dan
Santapan

Vaksin Covid dan
Kultus Individu

SISYPHUS #2, 2018
karya SIGIT SANTOSO

Rp 25.000.00

DUA BULANAN, NOMOR.01 - 02, TAHUN KE-70, 2021

JURNALISME SERIBU MATA
BASIS
menembus fakta

TANDA TANDA ZAMAN / A. Setyo Wibowo
Vaksin Covid-19 dan Kultus Individu ... 2

KACABENGGALA / A. Bagus Laksana
Melanholia dan Pengharapan ... 4

ETIKA / A. Sudiarja
Kebebasan, Moral, dan
Kebahagiaan ... 10

SOSIAL / J. Sudrijanta
Kontemplasi Batin ... 18

SOSOK / A. Meissi Santosa
BKS/Hengar: Yoga Modern ... 28

POLITIK / Klaus Heinrich Raditjo
Tianxia: Filsafat Cina
Tentang Tata Pemerintahan Dunia ... 33

SENI / Mujidi Sutrisno
Menikmati (Karya) Seni ... 40

SOSOK / Bandung Mawardi
Sartono Kartodirdjo (1921-2021):
Bacaan dan Santapan ... 45

SEJARAH / Iwan Setiawan
Taman yang Subur ... 49

PENDIDIKAN / M. Fauzi Sukri
Si Cilik Ruci:
Perihal Pendidikan-Pengajaran ... 52

SEJARAH / Muhammad Rizky Wiryawan
Malam dan Mojang Bandung:
Zaman Kolonial ... 55

SOSIAL / Susantini
Yang Dipelajari, Yang Dialami ... 59

BUKU / Albertus Erwin Susanto
Penyelesaian Kasus 1965:
Tak Mau dan Tak Mampu ... 61

SOSIAL / Ais Nurbiyah Al-Jum'ah
Makanan:
Tempat dan Rasa ... 65

70 TAHUN MAJALAH BASIS / Bandung Mawardi
Berhalaman Puisi ... 67

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Pertasihat

Frans Magnis-Suseno

P Swantoro

Pemimpin Umum

Sindhunata

Pemimpin Redaksi

A. Setyo Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja

Redaktur Pelaksana

A. Bagus Laksana

Wakil Redaktur Pelaksana

Purnawijayanti

Redaksi

B. Hari Juliwana

Heru Prakosa

B. Rahmanto

C. Bayu Risanto

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Purnawijayanti

Promosi/ Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Willy Putranta

Administrasi/ Distribusi

Anang Pramuriyanto

Marlia Dwijayanti

Keuangan

Francisca Triharyani, Ani Ratna Sari

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: 081225225423, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

Rekening:

BCA Sudirman Yogyakarta No. 0370285110

a.n. Sindhunata, BRI Cik Ditiro Yogyakarta No. 0029-

01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI Cab. Yogyakarta No. 1952000512

a.n. Bpk Sindhunata



Santana Prima Tour
your travelling partner

Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta
Email: tour.santana@yahoo.com

(0274) 513873
WA. 0877 3964 2832

SANTANA MONIKAYA
MONEY CHANGER

Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta 55233

☎ 0274 - 513 873

☎ 0875 3428 9151

Reservasi: • e-tiket pesawat dalam dan luar negeri • e-tiket kereta api • e-voucher hotel dalam dan luar negeri
• Paket tour dalam dan luar negeri • Pembuatan kartu identitas pelajar internasional/ ISIC • MICE
• Pengurusan paspor, visa dan asuransi perjalanan • Medical evacuation & charter flight • Money changer

Vaksin Covid-19 dan Kultus Individu

Berita buruk tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang terus menebarkan maut. Kabar suram lain, pandemi virus kultus individu yang menggerogoti demokrasi. Adakah vaksinnya?

A. SETYO WIBOWO

Pfizer, Moderna, Merck, AstraZeneca, dan Sinovac adalah beberapa nama pembuat vaksin yang diharapkan akan menormalkan hidup kita tahun 2021. Definisi vaksin tradisional adalah virus yang dilemahkan, disuntikkan ke dalam tubuh manusia agar memunculkan antibodi terhadap virus tersebut, hingga kebal terhadapnya. Ini yang dilakukan Sinovac untuk memproduksi vaksin CoronaVac. Di sisi lain, produksi Pfizer dan Moderna bukan vaksin dalam arti itu, melainkan hasil bioteknologi berbasis mRNA (*messenger RNA*). Mereka mengekstrak RNA dari virus Covid-19, membuat tiruannya, dan jadilah "vaksin" berupa RNA sintesis. Meski secara definisi bukan vaksin, penelitian membuktikan produk ini memunculkan antibodi seperti umumnya vaksin. Namun, kita masih menunggu efektivitasnya.

Pfizer mengeluarkan peringatan agar yang memiliki riwayat alergi tidak mengambil "vaksin" mereka. Pemerintah AS juga memantau kejadian *Bell's Palsy* (kelumpuhan parsial pada wajah) di antara penerima vaksin dari Pfizer.

Dengan demikian, apakah vaksin yang paling aman adalah CoronaVac? CoronaVac ditemukan hanya setahun sejak Covid-19 muncul. Padahal, biasanya butuh 2-4 tahun hingga vaksin stabil dan aman. Lagi pula, yang dijinakkan adalah virus yang beredar pertengahan pertama tahun 2020. Apakah vaksin berbasis virus berbulan lalu masih efektif untuk menangani mutasi kesekian virus Covid-19?

Meski sains andal, pertanyaan terus bermunculan. Data statistik menunjukkan negara sedigdaya Amerika Serikat pun sempoyongan. Korban meninggal 300 ribu lebih dan 16,5 juta warga terinfeksi, terbanyak di dunia. *Kompas* (16/12/20) membuat analisis, "Pandemi pun membuka mata dunia soal ketidakmampuan sejumlah pemimpin populis menangani pandemi. Selain Trump di AS, para pemimpin populis seperti Narendra Modi di India, Jair Bolsonaro di Brasil, dan Andres Manuel Lopez Obrador di Meksiko tertatih-tatih mengendalikan pandemi."

Pandemi Kultus Individu

Tahun 2020 juga diwarnai virus populisme, politik identitas, dan *post-truth*, yang tersimpul dalam fenomena kultus individu. Virus ini menginfeksi rakyat melalui algoritma media sosial (*Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp*). Sementara Covid-19 dihadapi dengan protokol kesehatan, kita masih meraba-raba cara meredam penyebaran virus politik ini.

Film dokumenter *The Social Dilemma* (2020) menampilkan petinggi perusahaan medsos yang tak peduli efek destruktif medsos. Mereka hanya memikirkan pemanfaatan ekonomis sebesar-besarnya atas hobi rakyat bermain *smartphone*. Mereka menciptakan mesin algoritma dengan tujuan monetisasi. Algoritma tidak ambil pusing bahwa yang dilihat orang adalah kanal konspirasi, bahwa demokrasi disabotase *fake news*, sehingga masyarakat terpolarisasi tajam.

Para petinggi medsos berargumen mereka hanya menciptakan alat, berdalih *software* gratisan menggem-

birakan orang. Betul, kita senang menggunakan *Facebook*, *Instagram*, dan *Whatsapp* yang gratis. Banyak hal positifnya hingga kita tidak rela medsos dimatikan.

Namun, kepada siapa kita bertanya ketika medsos memecah belah masyarakat? Ketika teori konspirasi atau ide antidemokrasi merambah pejabat negara, dosen, dan mahasiswa, lalu menciptakan pola pikir aneh, sehingga negara yang baik-baik saja dapat hancur seperti Suriah, siapa yang harus bertanggung jawab?

Di kalangan rakyat, ini terjadi. Sebuah video (Jember, 13/12/20) menampilkan seorang bapak berteriak-teriak mengatakan tingkah polisi seperti PKI, pemerintah dikuasai PKI. Dengan semangat membela HRS (pimpinan FPI yang ditangkap sehari sebelumnya, berita di *republika.co.id* 13/12/20), ia mengatakan ulama dikriminalisasi karena PKI dibiarkan. Dari mana asal sikap ideologi keras ini? Pasti dari *hoax* Pilpres 2019 yang terus dituip-tuipkan lewat medsos. *Hoax* tentang Jokowi PKI, meski sudah dibantah, masih ada yang mempercayainya. *Fact-checking* rupanya tidak menyelesaikan masalah *hoax*. Begitu masuk "sistem kepercayaan tertentu", argumen dan data sejelas apa pun hanya membuat orang yang merasa ditelanjangi makin *keukeuh*.

Vaksin Kultus Individu

Artikel "The resilience of democracy" di *The Economist* (28/11/20) mengulas, meski kultus individu atas Trump begitu kuat, meski tiap hari Trump mendelegitimasi Pilpres, sistem demokrasi Amerika terbukti memiliki antibodi untuk menahan serangan virus politik identitas, *post-truth*, dan populisme. Kuncinya, sistem dan lembaga demokratis di Amerika setia mengikuti standar yang ditetapkan para pendahulu.

Ibarat mobil, mesin demokrasi AS kokoh seperti *Mercy*, sehingga meski sopirnya mabuk dan mobil terjungkal, penumpang selamat, walau babak belur. Seturut analisis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, seusa Perang Dingin (1990), demokrasi tidak mati akibat kudeta secara melainkan karena "orang-orang yang terpilih" secara demokratis menyabotasinya (*How Democracies Die*, 2018).

Perilaku Presiden Trump dianggap mirip pemimpin sekte yang menuntut pemujaan tanpa *reserve*. Di mata Steven Hassan (*The Cult of Trump*, 2019), pengikut Trump seperti dicuci otak hingga delusif, menganggap Trump

"satu-satunya penyelamat", "pilihan Tuhan". Q-Anon situs penyebar konspirasi membuat mereka percaya Partai Demokrat adalah partai Iblis, menyitir cara berpikir mereka sehingga irasional, memandang dunia hitam putih dan pantang bernegosiasi.

Ahli psikiatri dan psikologi berpendapat Trump berbahaya karena sakit mental, narsis, dan sosiopat. Ia impulsif, penuh dendam, dan merasa tak pernah keliru. Figur seperti ini persis menjawab kebutuhan sebagian masyarakat AS yang juga menderita sakit mental akibat melemahnya ekonomi. Rakyat yang galau, meski sudah menemukan kebenaran, tetap butuh kawan dan *leader* (*www.psychologytoday.com*, 27/09/20).

Fenomena pemberhalaan manusia (*leader*) setingkat dewa, terjadi juga di Indonesia, membelah masyarakat (*cebong vs kampret/kadrun* pascapilkada DKI 2016). November lalu, viral seorang anak menyanyi lagu pujian untuk HRS (akun *youtube* KHODIM AL MADINAH, 26/11/20). Tanggal 14 Desember 2020 sekelompok anak muda menyanyikan: "makan pakai nasi, nyambil pakai terasi, bunuh jendral itu PKI, bunuh laskar itu polisi".

Apa vaksin untuk virus politik ini? Sistem dan mesin demokrasi kita belum sekokoh AS. Namun, dua kali sidang Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil Pilpres (2014 dan 2019) menunjukkan kita boleh yakin sistem hukum kita membaik. Kita tinggal menerapkan secara konsisten penegakan hukum seperti itu untuk kasus-kasus tuduhan konspiratif. Pierre Rosanvallon, pemikir kontemporer Prancis, menganjurkan kita "menganggap serius pengusung teori konspirasi" yang tidak masuk akal itu ("Le paradoxe du complotisme" oleh Cécile Prieure, di *L'Obs*, 2020). Meski omongan mereka tentang PKI aneh, pendukung teori konspirasi sejatinya sedang mempraktikkan nalar kritis terhadap rezim. Kita mesti menganggap mereka sama seperti kita, argumen mereka valid seperti argumen kita.

Menolak mereka hanya akan membuat mereka makin keras dalam *belief system* mereka sendiri. Yang harus dibangunkan bukanlah "siapa salah siapa benar", melainkan *jabatannya saling percaya*. Jokowi dan rezimnya mesti transparan dalam proses pengambilan keputusan. Jika rezim jujur bahwa ia juga kesulitan dan serba tak pasti dalam mengambil keputusan, barangkali kelompok yang merasa memiliki kebenaran menjadi lebih terbuka untuk berdialog. Semoga. ●